

Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012)

Eko Setiyawan, Choirul Saleh, Ainul Hayat

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: ekosetiyawan7@gmail.com

Abstract: *The Implementation of Educational Aid Policy (Study on Educational Aid Policy for Surakarta's societies that written in Surakarta Mayor Regulation Number 11A year 2012). Education is becoming one of main problem that have paid attention from Government of Surakarta. In order to achieve proper education and qualified, Government of Surakarta has given additional aid for education to societies. The result of this research shows the implementation of Educational Aid Policy for Surakarta's societies by Local Office of Education, Youth and Sport is good. It can be checked in (1) The acknowledgement of BPMKS recipient has run well; (2) Funds alocation of BPMKS has run well and has been suitable with the regulation; (3) Accountability report has run well and has been suitable with the regulation; (4) Monitoring used of funds BPMKS has run well; (5)The result of this policy has run well and researcher has not found problem therefore, there are many obstacles in order to implement this policy as follows: communication, lack of time allocation. and there is no unit who handle BPMKS.*

Keyword: *policy implementation, education, regulation of Mayor*

Abstrak: **Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam Peraturan Walikota Nomor 11A Tahun 2012).** Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan BPMKS, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana terlambat, dan belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS.

Kata kunci implementasi kebijakan, bantuan pendidikan, peraturan walikota

Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian di seluruh negara termasuk Negara Indonesia, hal ini dikarenakan kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan Pusat Statistik Pendidikan 2011, Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia dalam kurun waktu 2004-2009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of Child*), dan *Millenium Development Goals* (MDGs) serta *Summit on Sustainable Develop-*

ment yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Meskipun Indonesia telah merdeka selama 68 tahun, namun masyarakatnya belum sepenuhnya merdeka terutama dari kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah masyarakat miskin di Indonesia per Maret 2013 mencapai 28, 07 juta orang. Jumlah tersebut adalah 11, 37 persen dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Pendidikan yang semakin mahal yang harus ditanggung oleh

masyarakat ikut menambah beban masyarakat miskin. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun hal itu, masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan data Surakarta Dalam Angka tahun 2011 tentang jumlah penduduk usia sekolah menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin di Kota Surakarta, menunjukkan bahwa di Kota Surakarta masih banyak masyarakat usia sekolah yang belum bisa mendapatkan pendidikan dari pemerintah disebabkan karena kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Dari total penduduk Kota Surakarta usia 7-24 tahun yaitu sebanyak 323.370 jiwa, yang tidak pernah sekolah dan putus sekolah sebanyak 39.892 jiwa. Maka dari itu, untuk mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*), Kota Surakarta melakukan sebuah inovasi terkait penyelenggaraan satuan atau kebijakan pendidikan agar dapat dinikmati oleh semua lapisan dengan melakukan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau biasa disebut BPMKS.

Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) adalah dana bantuan pendidikan dari pemerintah Surakarta untuk penduduk kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya, kebijakan BPMKS juga tidak terlepas dari permasalahan, permasalahan itu diantaranya kurang adanya sosialisasi mengenai kebijakan BPMKS instruksi pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dianggap waktunya sangat singkat, dan pencairan dana BPMKS yang terlambat. Dari penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: yang pertama, bagaimanakah implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Kedua, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Ketiga, bagaimana hasil implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk

memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Selain itu juga untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin. Serta untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana hasil implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pendidikan

Sebelum membahas mengenai administrasi pendidikan, penulis terlebih dahulu akan membahas hubungan antara administrasi publik dengan administrasi pendidikan. Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004, h.3) mempunyai definisi yaitu proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinir untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Secara khusus administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksana dari kebijakan publik. Artinya administrasi publik lebih berkenaan dengan kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik maupun penyediaan barang-barang publik seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek yang merupakan urusan-urusan publik. Sehingga administrasi pendidikan merupakan bagian dari administrasi publik.

Administrasi pendidikan sebagai salah satu bagian dari urusan publik merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini dikarenakan aspek pendidikan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu pembahasan yang mendalam mengenai administrasi pendidikan. Sehingga pemerintah sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pendidikan dapat memberikan pelayanan publik yang bagus kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Bagi masyarakat kajian mengenai administrasi pendidikan juga akan memberikan peranan penting bagi pengembangan kualitas diri untuk menghadapi tantangan yang semakin besar dan membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi tantangan tersebut.

Menurut Wijono (1989, h.35) administrasi pendidikan adalah ilmu terapan yang mem-

pelajari keseluruhan proses kerjasama sekelompok orang yang melakukan kegiatan bersama di bidang pendidikan, dengan menggunakan tenaga, peralatan serta perlengkapan yang tersedia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Menurut Purwanto (1998, h.11-14) bidang garapan administrasi pendidikan terdiri dari: Administrasi Tatalaksana Sekolah, Administrasi Kepegawaian (Guru dan Tenaga Kependidikan), Administrasi Siswa/Murid, Administrasi Supervisi Pengajaran, Administrasi Pelaksanaan dan Pembinaan Kurikulum, Administrasi Pendirian dan Perencanaan Bangunan Sekolah, Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.

Menurut Wijono (2000, h.35), fungsi pokok administrasi pendidikan meliputi perencanaan yang mencakup pembuatan keputusan dan penyusunan program, pengorganisasian yang mencakup penyusunan struktur dan komunikasi, pimpinan yang mencakup pengkoordinasian dan komando, pemberian stimulus, dan pengawasan yang mencakup pemeriksaan dan penilaian.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, dia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980 dalam Abdul Wahab, 2004, h.59).

Dalam mengimplementasikan kebijakan akan terkait dengan beberapa bentuk implementasi yang digunakan. Model implementasi berfungsi dalam melihat dan menganalisa permasalahan yang ada, menyederhanakan suatu bentuk serta memudahkan dalam pelaksanaan nantinya. Model implementasi berkembang dari tahun ketahun sesuai dengan semakin rumitnya masalah yang dihadapi oleh para implementator kebijakan. Generasi yang pertama dari perkembangan studi implementasi adalah implementasi dengan pendekatan *top-down*, generasi kedua adalah implementasi dengan pendekatan *bottom-up*, dan generasi ketiga adalah implementasi dengan pendekatan sintesis.

Menurut Matland (1995) dalam jurnalnya yang berjudul *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*, sebelum menjelaskan tentang empat dasar model implementasi yaitu:

- a. *Administrative Implementation: Low Policy Ambiguity and Low Policy Conflict*
- b. *Political Implementation: Low Policy Ambiguity and high Policy Conflict*

- c. *Experimental Implementation: High Policy Ambiguity and Low Policy Conflict*
- d. *Symbolic Implementation: High Policy Ambiguity and high Policy Conflict*

Menurut Abdul Wahab (2004, h.110) untuk mengimplementasikan kebijakan dapat digunakan beberapa pendekatan antara lain :

- a. Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)
- b. Pendekatan-pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approach*).
- c. Pendekatan-pendekatan Keprilakuan
- d. Pendekatan-pendekatan Politik (*Political Approach*)

Menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Public Policy* (2008, h.650-652) pada dasarnya ada "lima tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementai kebijakan yaitu:

- a. Tepat kebijakannya.
- b. Tepat pelaksanaanya
- c. Tepat targetnya
- d. Tepat lingkungannya
- e. Tepat prosesnya

3. Tantangan Pendidikan bagi Anak dari Keluarga Miskin

Keluarga miskin adalah keluarga yang mempunyai sedikit uang atau tidak mempunyai uang sama sekali, tidak memiliki barang-barang atau kebutuhan lainnya atau dapat dikatakan suatu keluarga yang kesejahteraannya lemah, sebagaimana dikutip dalam *American Dictionary* (2010).

Sementara itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana (dalam BPS, 2008) memberikan definisi kemiskinan lebih operasional lagi dengan mempertimbangkan banyak variabel berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dilihat dari banyaknya aspek yang cukup luas, termasuk dari aspek pendidikan. Munculnya istilah yang dikenal dengan sebutan keluarga "Prasejahtera" (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah istilah lain dari yang dimaksud kemiskinan versi BKKBN. Jelasnya, sebuah keluarga akan dikategorikan Prasejahtera atau miskin apabila yang bersangkutan tidak memenuhi satu atau seluruh indikator berikut ini:

1. Tidak mampu makan dua kali sehari;
2. Tidak memiliki pakaian ganti untuk beberapa kegiatan;
3. Tidak mampu berobat ketenaga atau sarana pelayanan kesehatan; dan
4. Tidak memiliki tempat tinggal atau rumah yang sebagian lantainya terdiri dari tanah atau rumah gubuk.

Sementara itu keluarga miskin yang termasuk dalam kategori sejahtera I indikatornya

adalah kendatipun mereka sudah mampu makan dua kali sehari, tetapi dalam satu minggu tidak pernah memakan lauk pauk yang bergizi. Indikator lainnya, meskipun rumah mereka tidak lagi berlantai tanah, namun luasnya kurang dari 8m² per jiwanya. Menariknya, BKKBN yang perumusannya definisinya melibatkan para sosiolog yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia (ISSI) itu juga memasukkan variabel pendidikan sebagai salah satu indikatornya. Jelasnya, sebuah keluarga juga akan termasuk kategori “Sejahtera I” jika yang bersangkutan memiliki setidaknya satu anggota keluarga yang berusia 7-15 tahun tidak bersekolah. Dengan demikian, semakin banyak penduduk usia 7-15 tahun tidak bersekolah, maka akan semakin tinggi jumlah kategori “Sejahtera I”.

Apabila dikaitkan dengan kompleksnya definisi kemiskinan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka banyak faktor yang bisa digali untuk mengetahui penyebab anak dari keluarga miskin tidak mampu melanjutkan sekolah. Toenlie (1994), mengemukakan paling sedikit ada dua hal penyebab rendahnya jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) yang melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni rendahnya kemampuan ekonomi orang tua dan terkait dengan masalah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan tingkat SMP bagi anaknya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan sebuah pilihan bagi peneliti untuk digunakan dalam melakukan penelitian ini. Menurut Arikunto (2002), Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Secara umum penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ingin menggambarkan suatu keadaan secara apa adanya dan setepat mungkin. Untuk itu, di dalam melakukan penelitian, peneliti harus menentukan fokus penelitian terlebih dahulu agar proses penelitian nanti bisa mudah dan berjalan secara sistematis.

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan BPMKS ini, peneliti menggunakan

pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini dapat mendeskripsikan fenomena yang ada dengan tepat dan apa adanya. Pendekatan kualitatif merupakan metode pencatatan atas pengamatan dan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan & Taylor dalam Moelong (2002, h.3) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sehubungan dengan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin, maka peneliti memberi batasan fokus berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin yang terdiri dari
 - a. Penetapan penerima BPMKS
 - b. Pengalokasian dana BPMKS
 - c. Laporan pertanggungjawaban BPMKS.
 - d. Monitoring penggunaan dana BPMKS
2. Hasil Implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin.
3. Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta sebagai upaya untuk memperluas akses pendidikan masyarakat miskin.

Lokasi penelitian di Kota Surakarta dan situs penelitian pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis pertama yang digunakan adalah Model Interaktif dari Miles dan Hubberman yang diterjemahkan dalam Sugiyono (1992, h.20). Analisis model interaktif ini melalui 3 tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis yang kedua, adalah *force field analisis* (FFA) yang dikembangkan oleh Kurt Lewin yaitu dengan mengidentifikasi *driving force* dan *constraining force*.

Pembahasan

Implementasi kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta merupakan salah satu contoh pelaksanaan administrasi. Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerjasama dan upaya (organisasi dan

manajemen) yang bersifat sistematis, rasional, dan manusiawi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Ini terlihat dari kebijakan BPMKS di Kota Surakarta yang melibatkan beberapa instansi pemerintah yang mempunyai tujuan yang sama. Diantaranya Pemerintah Kota Surakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Sekolah-sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat Kota Surakarta, murid selaku penerima BPMKS. Instansi dan pihak-pihak tersebut mempunyai tugas serta fungsi masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Implementasinya di Kota Surakarta sendiri pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan adalah Dikpora dan sekolah.

BPMKS dikategorikan sebagai salah satu dari kebijakan publik yang pelaksanaannya menggunakan pendekatan prosedural dan manajerial karena kebijakan ini mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Hal ini didasari bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah Kota Surakarta, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari pemerintah Kota Surakarta. Dalam konteks BPMKS, Kebijakan tersebut dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan tujuan untuk menyukseskan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun, meningkatkan layanan dan mutu pendidikan, dan memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan yang tertuang dalam PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 tentang BPMKS. Kebijakan BPMKS di Kota Surakarta adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka, demi tercapainya kualitas pendidikan yang bermutu di Surakarta. Kebijakan BPMKS telah dipilih oleh *policy maker* dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan BPMKS ditentukan oleh banyak faktor yang masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dalam pembahasan ini peneliti akan melakukan 3 hal, yang pertama peneliti akan berusaha menilai implementasi kebijakan BPMKS secara parsial berdasarkan model implementasi Matland. Kedua, menganalisis secara umum seberapa efektifkah implementasi yang dikemukakan oleh Nugroho, dan yang terakhir menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan BPMKS menggunakan FFA yang dikembangkan Lewin. Hal ini untuk menjawab apakah tujuan kebijakan BPMKS yaitu menyukseskan program penuntasan wajib belajar

pendidikan dasar sembilan tahun menuju wajib belajar pendidikan dua belas tahun, meningkatkan layanan dan mutu pendidikan, dan memenuhi hak dasar masyarakat miskin dan tidak mampu dalam bidang pendidikan bisa tercapai. Peneliti meyakini apabila suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan tepat maka tujuan dari sebuah kebijakan akan tercapai.

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin

Dalam implementasi kebijakan BPMKS yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Surakarta ini terdiri dari beberapa tahap yaitu penetapan penerima BPMKS, pengalokasian dana BPMKS, laporan pertanggungjawaban BPMKS. Dari semua tahapan tersebut telah berjalan dengan baik, terbukti dari sisi *Policy Conflict* dan juga *Ambiguity* yang terjadi sangat rendah mulai dari pihak Dikpora, sekolah-sekolah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sehingga menurut Matland kebijakan ini dikategorikan sebagai kebijakan dengan model administratif karena memiliki tingkat *Policy Conflict* dan *Ambiguity* kebijakan yang sangat rendah. Dari segi efektifitasnya, kebijakan BPMKS ini juga sudah dikategorikan sebagai kebijakan yang efektif. Terbukti dari kelima sisi seperti yang telah dikemukakan oleh Nugroho (2009, h. 650-652) yang terdiri dari tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya, tepat lingkungannya, dan tepat prosesnya. Dari sisi tepat kebijakannya, kebijakan BPMKS ini telah disusun sesuai dengan karakter masalahnya yaitu dengan memberikan bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin. Dari sisi tepat pelaksanaannya juga sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari semua lembaga yang terkait yaitu Dikpora, sekolah-sekolah, masyarakat, dan LSM telah menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Dari sisi tepat target, kebijakan ini telah menentukan target dengan tepat yaitu kepada masyarakat miskin di Kota Surakarta. Dari sisi tepat lingkungan, kebijakan ini sudah tepat lingkungannya, karena Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang mempunyai kualitas pendidikan yang bagus. Dari sisi tepat prosesnya, kebijakan ini telah dilaksanakan mulai dari penetapan penerima sampai monitoring penggunaan dananya pun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Hasil Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta

untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin.

Dari sisi *Policy Conflict* yang terjadi dalam hasil implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ini adalah antara Dikpora sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai objek kebijakan dan juga antara masyarakat dan masyarakat. Setelah peneliti melakukan penelitian ternyata tidak ada konflik yang terjadi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan masyarakat Kota Surakarta juga antara masyarakat sendiri mengenai hasil implementasi dari Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Hal ini disebabkan masyarakat dan Dikpora mengatakan bahwa hasil dari implementasi memberikan dampak positif yaitu dapat membantu masyarakat miskin dalam memperoleh layanan pendidikan dari pemerintah. Kemudian dari tingkat ambiguitasnya, pada hasil implementasi Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Potensi ambiguitas dapat saja timbul antara Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Kota Surakarta dengan masyarakat sebagai penerima dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta atau objek dari kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dalam menafsirkan tujuan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ambiguitas tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan Dikpora Kota Surakarta selaku sebagai lembaga pelaksana kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta dan masyarakat sebagai objek kebijakan atau penerima dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta sama-sama memahami dan mengerti tentang pengertian dan tujuan kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ambiguity policy* dalam hasil implementasi kebijakan sangat rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta ini dari segi hasil sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Menurut Matland, apabila suatu implementasi kebijakan mempunyai tingkat konflik yang rendah dan tingkat ambiguitas yang rendah juga, maka model yang tepat adalah menggunakan model menggunakan model *administrative*, dalam *model Administrative Implementation*.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta untuk Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat Miskin

Faktor pendukung dan penghambat sejatinya akan selalu ada dalam setiap implementasi kebijakan tinggal bagaimana usaha para pelaksana kebijakan untuk dapat mengatur faktor pendukung dan penghambat implementasi itu menjadi sebuah dampak yang positif bagi implementasi kebijakan itu sendiri. Dari implementasi kebijakan BPMKS di Kota Surakarta sendiri terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPMKS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPMKS. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga yang berjalan kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS, pencairan dana BPMKS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPMKS

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan BPMKS mulai dari proses penetapan penerima dana BPMKS, pengalokasian dana, laporan pertanggungjawaban dana, dan monitoring penggunaan dana BPMKS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Kemudian Dari pelaksanaan BPMKS ini juga sudah memberikan hasil yang berdampak positif terhadap obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Surakarta selaku penerima dana BPMKS. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPMKS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPMKS. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga terkait yang kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS, pencairan dana BPMKS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPMKS

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. (2004) **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.

- American Dictionary.** (2010) **Definition Poor Family.** [Internet]. Available from: <www.education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/poorfamily/> [Accessed 5th September 2013].
- Badan Pusat Statistik (BPS) (2008) **Pedoman Survei Sosial Ekonomi Nasional.** Jakarta, Badan Pusat Statistik.
- Keban, Yeremis. (2004) **Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan.** Yogyakarta, Gava Media.
- Lampiran Profil Pendidikan 2013.** (2014) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kota Surakarta
- Matland, Richard E. (1995) **Syntesing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation.** Journal of Pubic Administration Research and Theory. Vol.5, No. 2.
- Moleong, Lexy J. (2002) **Metodologi Penelitian Kualitatif.** Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2008) **Public Policy.** Jakarta, Gramedia.
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 Tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta. Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta.
- Purwanto, Ngalim. (1998) **Administrasi dan Supervisi Pendidikan.** Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (1992) **Memahami Penelitian Kualitatif.** Bandung, Alfabeta.
- Wijono (2000) **Administrasi dan Supervisi Pendidikan.** Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti Depdikbud.